



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 667035

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 24.490.512.613

1. Tanah Seluas 1.800 m2 di KAB / KOTA JEMBRANA, HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000
2. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA JEMBRANA, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
3. Tanah Seluas 575 m2 di KAB / KOTA JEMBRANA, HASIL SENDIRI Rp. 86.250.000
4. Tanah Seluas 140 m2 di KAB / KOTA JEMBRANA, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
5. Tanah Seluas 2.710 m2 di KAB / KOTA JEMBRANA, HASIL SENDIRI Rp. 406.500.000
6. Tanah Seluas 310 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 46.500.000
7. Tanah Seluas 2.000 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 2.750.000.000
9. Tanah Seluas 525 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
11. Tanah Seluas 145 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI



- Rp. 300.000.000
12. Tanah Seluas 1.755 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI
Rp. 3.500.000.000
13. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI
Rp. 500.000.000
14. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL
SENDIRI Rp. 1.050.000.000
15. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/75 m2 di KAB / KOTA KOTA
DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.050.000.000
16. Tanah Seluas 420 m2 di KAB / KOTA JEMBRANA, HASIL SENDIRI
Rp. 150.000.000
17. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA JEMBRANA, HASIL SENDIRI
Rp. 175.000.000
18. Tanah Seluas 1.706 m2 di KAB / KOTA BADUNG, Rp.
2.125.000.000
19. Tanah Seluas 1.000 m2 di KAB / KOTA JEMBRANA, HASIL
SENDIRI Rp. 350.000.000
20. Tanah Seluas 1.400 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL
SENDIRI Rp. 980.000.000
21. Tanah Seluas 324 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI
Rp. 405.000.000
22. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI
Rp. 350.000.000
23. Tanah Seluas 185 m2 di KAB / KOTA JEMBRANA, HASIL SENDIRI
Rp. 37.000.000
24. Tanah Seluas 1.000 m2 di KAB / KOTA JEMBRANA, HASIL
SENDIRI Rp. 200.000.000
25. Tanah Seluas 1.000 m2 di KAB / KOTA JEMBRANA, HASIL
SENDIRI Rp. 200.000.000
26. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI
Rp. 1.050.000.000
27. Tanah dan Bangunan Seluas 6 m2/26 m2 di KAB / KOTA KOTA
SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 612.612.613
28. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI
Rp. 1.650.000.000



29. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/126 m2 di KAB / KOTA
BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 775.000.000

30. Tanah Seluas 29 m2 di KAB / KOTA BANGLI, HASIL SENDIRI Rp.
24.650.000

31. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BANGLI, HASIL SENDIRI Rp.
255.000.000

32. Tanah Seluas 256 m2 di KAB / KOTA BANGLI, HASIL SENDIRI Rp.
217.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 220.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
200.000.000

2. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 110.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 66.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 500.000.000

Sub Total Rp. 25.386.512.613

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 25.386.512.613

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.